

Penguatan Tata Kelola Keuangan Digital, Manajemen Operasional, dan Legalitas Usaha pada Industri Pande Tradisional di Bali Berbasis Ekonomi Kreatif

Kadek Goldina Puteri Dewi^{1*}; Ni Made Wahyuni¹, Desak Gde Dwi Arini¹, Ketut Asti
Purwanti¹, Faulina¹, Putu Mahendra Reysia Putra¹

¹Universitas Warmadewa, Denpasar, Indonesia

goldinaputeri@gmail.com

| Received: 29/08/2026 |

Revised: 08/10/2026 |

Accepted: 11/11/2026 |

Copyright©2026 by authors. Authors agree that this article remains permanently open access under the
terms of the Creative Commons

Abstrak

Industri pande tradisional merupakan bagian dari ekonomi kreatif lokal Bali yang menghasilkan berbagai produk berbahan logam sekaligus menjaga keterampilan, nilai budaya, dan kearifan lokal yang diwariskan secara turun-temurun. Meskipun memiliki potensi ekonomi dan budaya yang kuat, pengelolaan usaha pada kelompok mitra masih menghadapi berbagai kendala, terutama dalam tata kelola keuangan, pengendalian biaya, manajemen operasional, pemanfaatan teknologi digital, serta aspek legalitas usaha. Kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk memperkuat kapasitas usaha Kelompok Tiuk Pande Tatasan melalui penerapan pencatatan keuangan digital, penyusunan laporan keuangan sederhana, perhitungan harga pokok produksi, penyusunan standar operasional prosedur, pencatatan persediaan, penguatan pemasaran digital, serta pendampingan legalitas usaha. Metode yang digunakan adalah *Participatory Action Research* (PAR) dengan lima tahapan utama, yaitu analisis kebutuhan dan koordinasi awal, sosialisasi dan peningkatan kapasitas, implementasi dan pendampingan, monitoring dan evaluasi, serta keberlanjutan program dan diseminasi hasil. Hasil pelaksanaan menunjukkan adanya perubahan dalam praktik pengelolaan usaha mitra. Mitra mulai mampu melakukan pencatatan transaksi dan menyusun laporan keuangan sederhana, menghitung biaya produksi sebagai dasar penentuan harga jual, menyusun dan menerapkan SOP, memulai pencatatan persediaan, serta memanfaatkan media digital untuk promosi. Program ini juga memberikan pendampingan dalam pengurusan legalitas usaha. Pendekatan pendampingan yang partisipatif dan praktik langsung menjadi faktor penting dalam proses transfer pengetahuan serta penerapan inovasi. Secara keseluruhan, kegiatan ini memperkuat fondasi pengelolaan usaha yang lebih terstruktur, terdokumentasi, berbasis digital, dan berkelanjutan.

Kata kunci: ekonomi kreatif; keuangan digital; legalitas usaha; manajemen operasional; pande tradisional

Abstract

Traditional pande industry is part of Bali's local creative economy, producing metal-based products while preserving inherited skills, cultural values, and local wisdom. Despite its economic and cultural potential, the partner group still faced constraints in financial governance, cost control, operational management, digital utilization, and business legality. This community service program aimed to strengthen the Tiuk Pande Tatasan Group's

capacity by implementing digital financial recording, simple financial reporting, production cost calculation, standard operating procedures, inventory recording, digital marketing, and business legality assistance. The program used a Participatory Action Research (PAR) approach with five stages: needs analysis and initial coordination, socialization and capacity building, implementation and mentoring, monitoring and evaluation, and program sustainability and dissemination. Implementation results indicate gradual improvements in partners' business practices. Partners began recording transactions and preparing simple financial reports, calculating production costs to inform pricing, developing and implementing operational procedures, initiating inventory recording, and using digital media for product promotion. The program also assisted with business legal requirements. Participatory mentoring and direct practice were essential to facilitating knowledge transfer and the adoption of innovation. Overall, the program strengthened the foundation for a more structured, documented, digital-based, and sustainable management system for traditional pande enterprises.

Keywords: creative economy; digital finance; business legality; operational management; traditional pande

Pendahuluan

Industri pande tradisional merupakan salah satu bentuk kegiatan ekonomi kreatif yang memiliki keterkaitan kuat dengan identitas budaya dan kehidupan masyarakat Bali. Produk yang dihasilkan, seperti pisau, blakas, mutik, dan seselet, tidak hanya berfungsi sebagai peralatan berbahan logam, tetapi juga memiliki nilai historis, sosial, budaya, dan ekonomi. Keberadaan pengrajin pande menunjukkan keberlanjutan pengetahuan dan keterampilan yang diwariskan antargenerasi. Namun, keberlangsungan industri tradisional tidak hanya ditentukan oleh kemampuan teknis pengrajin dalam menghasilkan produk, melainkan juga oleh kemampuan pelaku usaha dalam mengelola proses bisnis secara efektif serta menyesuaikan diri dengan perkembangan ekonomi digital.

Kelompok Tiuk Pande Tatasan yang menjadi mitra dalam kegiatan ini merupakan kelompok pengrajin yang berlokasi di wilayah Dangin Puri Kangin, Kota Denpasar, Bali. Mitra terdiri atas kelompok masyarakat yang produktif secara ekonomi dengan jumlah anggota sebanyak 15 orang. Secara umum, usaha pande dikelola dalam skala mikro dan kecil serta masih menunjukkan karakter usaha keluarga. Kegiatan produksi sangat bergantung pada keterampilan manual, pengalaman individu, dan kebiasaan kerja yang telah berlangsung secara turun-temurun. Kondisi tersebut menjadi kekuatan karena mempertahankan keunikan produk, tetapi pada saat yang sama menimbulkan keterbatasan ketika proses usaha belum didukung oleh sistem administrasi dan tata kelola yang terdokumentasi.

Berdasarkan observasi awal, kondisi usaha menunjukkan bahwa persoalan utama mitra lebih dominan berada pada aspek manajemen dibandingkan dengan aspek teknis produksi. Proses produksi masih menggunakan peralatan tradisional dengan tingkat mekanisasi yang rendah. Kapasitas dan waktu produksi sangat bergantung pada tenaga kerja manual serta pengalaman pengrajin. Variasi desain produk juga masih terbatas, sehingga penyesuaian terhadap tren pasar belum dilakukan secara optimal. Selain itu, kualitas produk belum didukung oleh standar tertulis dan pengetahuan teknis masih banyak melekat pada individu tertentu. Ketergantungan pada tenaga ahli tanpa dokumentasi prosedur dapat menimbulkan risiko ketika terjadi perubahan tenaga kerja atau proses regenerasi pengrajin.

Pada aspek manajemen bahan baku dan hasil produksi, mitra belum memiliki sistem pencatatan yang terstruktur. Jumlah bahan baku yang masuk, penggunaan bahan, hasil produksi, dan ketersediaan stok belum selalu dicatat secara sistematis. Kondisi ini menyulitkan pengawasan persediaan serta evaluasi efisiensi penggunaan bahan. Keterbatasan informasi mengenai aliran bahan juga berpengaruh terhadap kemampuan usaha dalam merencanakan kebutuhan produksi dan mengendalikan biaya.

Permasalahan yang paling mendasar terlihat pada tata kelola keuangan. Transaksi pemasukan dan pengeluaran belum didokumentasikan secara teratur, sementara keuangan usaha masih berpotensi bercampur dengan keuangan rumah tangga. Mitra belum memiliki laporan laba rugi, arus kas, maupun pencatatan aset usaha yang dapat digunakan sebagai dasar evaluasi. Tanpa informasi keuangan yang memadai, pemilik usaha mengalami keterbatasan dalam memahami kondisi usaha, menilai laba atau rugi, merencanakan, mengendalikan biaya, serta mengambil keputusan berdasarkan data.

Pengendalian biaya produksi juga belum dilakukan melalui prosedur perhitungan yang konsisten. Mitra belum memiliki format yang digunakan secara teratur untuk menghitung biaya bahan baku, tenaga kerja, dan unsur biaya lainnya sebagai dasar penentuan harga pokok produksi. Akibatnya, penetapan harga jual belum sepenuhnya didasarkan pada informasi biaya yang terstruktur. Persoalan ini berhubungan langsung dengan keberlanjutan usaha karena kemampuan menghasilkan produk perlu diikuti oleh kemampuan memahami biaya yang dikeluarkan serta merencanakan penggunaan sumber daya secara lebih efisien.

Dari sisi operasional, belum tersedianya standar operasional prosedur menjadi salah satu masalah yang penting. Proses produksi, pengelolaan persediaan, pengendalian kualitas, dan pembagian tugas belum didukung oleh standar tertulis yang dapat dijadikan pedoman bersama. Praktik kerja yang berbasis pada kebiasaan dan pengalaman individu berpotensi menimbulkan ketidakkonsistenan dalam pelaksanaan kegiatan. Karena itu, penyusunan SOP tidak dimaksudkan untuk menggantikan keterampilan tradisional, melainkan untuk mendokumentasikan proses penting agar lebih mudah diterapkan, dikendalikan, dan diwariskan.

Pemanfaatan teknologi digital oleh mitra juga masih terbatas. Sebagian promosi dilakukan melalui media sosial secara sederhana, tetapi belum terintegrasi ke dalam strategi pemasaran yang terencana. Jangkauan pasar masih banyak bergantung pada pelanggan tetap, penjualan langsung, pasar tradisional, dan pesanan khusus. Kondisi ini menunjukkan adanya peluang untuk memperkuat visibilitas usaha melalui katalog digital, media sosial usaha, profil bisnis digital, dan pengenalan marketplace sesuai kebutuhan mitra.

Selain persoalan manajemen dan digitalisasi, aspek legalitas usaha menjadi prioritas karena sebagian mitra belum memiliki dokumen legal yang memadai, termasuk Nomor Induk Berusaha (NIB). Keterbatasan pemahaman mengenai legalitas dapat memengaruhi akses usaha terhadap program pemerintah, pembiayaan formal, dan peluang kerja sama. Oleh sebab itu, pendampingan legalitas diposisikan sebagai bagian dari penguatan kapasitas kelembagaan usaha, bukan sekadar kegiatan administratif.

Prioritas program kemudian dirumuskan secara terpadu karena permasalahan yang dihadapi saling berkaitan. Pencatatan keuangan digital akan lebih efektif apabila transaksi dan biaya produksi telah terdokumentasi. Pengendalian biaya membutuhkan informasi persediaan dan proses operasional yang lebih terstandar. Pemasaran digital membutuhkan kesiapan produk,

informasi usaha, dan media promosi. Sementara itu, legalitas dapat memperkuat posisi usaha untuk mengakses peluang pengembangan yang lebih luas. Dengan demikian, penguatan tata kelola keuangan, manajemen operasional, digitalisasi, pemasaran, dan legalitas dilaksanakan sebagai satu rangkaian pemberdayaan.

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan keberlanjutan usaha mitra melalui lima arah utama. Pertama, memperkuat pencatatan dan pelaporan keuangan sederhana berbasis digital. Kedua, meningkatkan kemampuan dalam menghitung biaya produksi dan harga pokok produksi sebagai dasar penetapan harga jual. Ketiga, menyusun dan menerapkan SOP serta sistem pencatatan persediaan. Keempat, meningkatkan pemanfaatan teknologi digital untuk pengelolaan dan promosi usaha. Kelima, meningkatkan pemahaman dan proses pengurusan legalitas usaha. Secara lebih luas, program ini diharapkan dapat membentuk model pemberdayaan yang dapat menjadi pembelajaran bagi usaha kerajinan tradisional sejenis.

Pelaksanaan kegiatan juga memiliki keterkaitan dengan pembelajaran kontekstual melalui keterlibatan mahasiswa dalam analisis masalah, pendampingan usaha, serta praktik penerapan solusi. Kegiatan mendukung pembelajaran berbasis proyek, penguatan kemampuan komunikasi, analisis bisnis UMKM, penyusunan administrasi keuangan sederhana, serta pemahaman terhadap aspek hukum dalam usaha. Keterlibatan tersebut memberikan ruang bagi mahasiswa untuk menerapkan pengetahuan akademik pada permasalahan nyata di masyarakat.

Dengan karakter permasalahan tersebut, kegiatan pengabdian tidak hanya berorientasi pada pemberian pelatihan sekali. Pendekatan yang dipilih menekankan proses identifikasi kebutuhan, peningkatan kapasitas, praktik langsung, pendampingan, monitoring, evaluasi, serta keberlanjutan. Melalui pendekatan tersebut, program diharapkan dapat menghasilkan perubahan praktik yang dapat terus digunakan oleh mitra dalam kegiatan usaha sehari-hari.

Permasalahan Prioritas Mitra

Hasil observasi, wawancara, dan diskusi dengan mitra menunjukkan bahwa permasalahan utama industri pande tradisional tidak hanya terletak pada aspek produksi, tetapi juga pada pengelolaan usaha secara menyeluruh. Keterbatasan dalam pencatatan keuangan, pengendalian biaya dan persediaan, penerapan SOP, pemanfaatan teknologi digital, pemasaran, serta legalitas usaha menjadi faktor yang menghambat efisiensi dan keberlanjutan usaha. Untuk rincian permasalahan mitra dan dampaknya disajikan pada Tabel 1, seperti berikut.

Tabel 1 Permasalahan prioritas dan dampaknya terhadap pengelolaan usaha mitra

No.	Permasalahan	Kondisi Eksisting	Dampak
1	Pencatatan keuangan belum terstruktur	Transaksi belum terdokumentasi secara sistematis; keuangan usaha dan rumah tangga belum terpisah dengan memadai.	Pemilik usaha kesulitan mengetahui kondisi keuangan serta laba/rugi.
2	Pengendalian biaya belum memadai	Perhitungan biaya produksi dan HPP belum dilakukan secara terstruktur.	Penetapan harga jual dan pengendalian biaya belum optimal.
3	SOP operasional belum tersedia	Proses produksi, persediaan, kualitas, dan pembagian tugas belum memiliki standar tertulis.	Pelaksanaan kerja berpotensi tidak konsisten.
4	Pencatatan persediaan belum sistematis	Bahan baku dan hasil produksi belum dimonitor melalui sistem pencatatan yang terstandar.	Kontrol stok dan efisiensi penggunaan bahan menjadi terbatas.
5	Pemasaran digital masih terbatas	Media digital digunakan secara sederhana dan belum didukung strategi promosi yang terstruktur.	Jangkauan pasar dan visibilitas usaha masih terbatas.
6	Legalitas usaha belum lengkap	Pemahaman dan proses pengurusan NIB belum dilaksanakan sepenuhnya.	Akses terhadap program dan peluang pengembangan usaha menjadi terbatas.

Metodologi Pengabdian

Kegiatan pengabdian menggunakan pendekatan *Participatory Action Research* (PAR). Pendekatan ini menempatkan mitra sebagai subjek aktif dan mitra strategis dalam seluruh rangkaian kegiatan. Identifikasi masalah, penentuan kebutuhan, penerapan solusi, serta evaluasi dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi nyata usaha. Penggunaan pendekatan partisipatif penting karena solusi yang diterapkan harus dapat diterima dan digunakan oleh mitra setelah program pendampingan berakhir.

Metode pelaksanaan mengombinasikan sosialisasi, pelatihan, diskusi, studi kasus, demonstrasi, praktik langsung atau *learning by doing*, pendampingan intensif, monitoring, dan evaluasi. Sosialisasi digunakan untuk membangun pemahaman awal tentang tujuan program.

Pelatihan dan diskusi digunakan untuk meningkatkan pengetahuan. Demonstrasi dan praktik langsung digunakan untuk menghubungkan materi dengan kebutuhan operasional sehari-hari. Pendampingan dilakukan untuk membantu mitra menerapkan hasil pelatihan serta menyesuaikan perangkat yang digunakan dengan kondisi usaha.

Solusi yang ditawarkan dirancang berdasarkan enam kelompok persoalan utama. Pada aspek keuangan, solusi berupa pendampingan pencatatan transaksi digital, penyusunan laporan keuangan sederhana, serta penguatan pemisahan keuangan usaha dan keuangan rumah tangga. Pada aspek biaya, dilakukan pelatihan mengenai perhitungan biaya produksi, harga pokok produksi, penentuan harga jual, serta pengendalian biaya. Pada aspek operasional, dilakukan penyusunan SOP produksi, persediaan, pengendalian kualitas, serta pembagian tugas.

Pada aspek persediaan, solusi berupa penyusunan sistem pencatatan bahan baku dan hasil produksi serta penggunaan kartu stok atau format monitoring sederhana. Pada aspek pemasaran, solusi diarahkan pada optimalisasi media sosial, penyusunan katalog digital, pengembangan Google Business Profile, serta pengenalan marketplace. Pada aspek legalitas, dilakukan sosialisasi mengenai pentingnya legalitas serta pendampingan dalam proses pengurusan NIB dan dokumen pendukung.

Pelaksanaan program dilakukan melalui lima tahapan yang saling berkaitan. Tahap pertama adalah analisis kebutuhan dan koordinasi awal. Pada tahap ini, tim dan mitra menyamakan persepsi mengenai tujuan, ruang lingkup kegiatan, pembagian peran, serta jadwal pelaksanaan. Observasi, wawancara, dan diskusi digunakan untuk mengidentifikasi kondisi yang ada serta menetapkan prioritas kebutuhan.

Tahap kedua adalah sosialisasi dan peningkatan kapasitas bagi para mitra. Materi yang diberikan mencakup tata kelola usaha, literasi keuangan, pengendalian biaya produksi, digitalisasi usaha, pemasaran digital, serta aspek legalitas. Penyampaian dilakukan secara interaktif dengan mempertimbangkan kebutuhan pelaku usaha agar materi tidak berhenti pada pemahaman konseptual.

Tahap ketiga adalah implementasi dan pendampingan. Tahap ini merupakan inti dari penerapan program karena mitra didampingi untuk menggunakan sistem pencatatan keuangan digital, menyusun laporan sederhana, menghitung HPP, menggunakan format persediaan, menyusun SOP, mengembangkan media pemasaran digital, serta melanjutkan proses legalitas. Pendampingan dilakukan melalui praktik langsung agar mitra memperoleh pengalaman dalam menggunakan perangkat yang telah diserahkan.

Tahap keempat adalah monitoring dan evaluasi. Monitoring dilakukan untuk melihat tingkat penerapan solusi, mengidentifikasi kendala, serta menilai perubahan dari kondisi awal ke kondisi setelah pelaksanaan program. Evaluasi tidak hanya memperhatikan ketersediaan dokumen atau perangkat, tetapi juga penggunaan perangkat tersebut oleh mitra.

Tahap kelima adalah keberlanjutan program dan diseminasi hasil. Tim dan mitra menyusun tindak lanjut melalui pembinaan berkala, konsultasi, penyempurnaan sistem, serta komitmen untuk mempertahankan praktik pengelolaan yang telah mulai diterapkan. Hasil kegiatan juga diarahkan untuk disebarluaskan melalui publikasi ilmiah dan media lainnya.

Waktu dan Tempat Pelaksanaan

Program dilaksanakan pada tahun 2026 di Kelompok Tiuk Pande Tatasan yang berlokasi di Dangin Puri Kangin, Kota Denpasar, Bali. Lokasi mitra relatif dekat dengan institusi pengusul sehingga memungkinkan proses koordinasi, kunjungan lapangan, dan pendampingan dilakukan secara lebih intensif. Kedekatan lokasi mendukung model pengabdian yang tidak hanya berbasis pelatihan, tetapi juga pendampingan berkelanjutan.

Hasil dan Pembahasan

Hasil Analisis Kondisi Awal Mitra

Hasil observasi, wawancara, dan diskusi menunjukkan bahwa industri pande tradisional memiliki potensi ekonomi karena menghasilkan produk bernilai budaya dan masih memiliki pasar. Namun, proses pengelolaan usaha belum didukung oleh sistem manajemen yang memadai. Kondisi awal tersebut menjadi dasar untuk menentukan urutan pendampingan dan bentuk perangkat yang akan diberikan.

Pada aspek produksi, proses kerja masih didominasi oleh penggunaan peralatan tradisional dan keterampilan manual. Ketergantungan pada pengalaman individu menyebabkan kapasitas dan kualitas produksi sangat dipengaruhi oleh pengrajin tertentu. Dokumentasi standar kerja belum tersedia secara lengkap. Karena itu, salah satu fokus program adalah mendokumentasikan prosedur penting agar proses kerja memiliki pedoman yang dapat digunakan bersama.

Pada aspek keuangan, belum tersedianya pencatatan yang sistematis menjadi kendala utama. Mitra belum memiliki sistem yang mampu merekam transaksi penerimaan dan pengeluaran secara konsisten serta menghasilkan informasi sederhana mengenai kondisi usaha. Kondisi ini memengaruhi perencanaan, evaluasi, dan pengambilan keputusan.

Pada aspek operasional, perencanaan biaya, pengelolaan persediaan, dan SOP belum terintegrasi. Sementara itu, pada aspek pemasaran, penggunaan media digital masih sederhana. Pada aspek legalitas, kebutuhan pendampingan muncul karena dokumen usaha belum lengkap dan pemahaman mengenai manfaat legalitas masih perlu diperkuat.

Penguatan Tata Kelola Keuangan Digital

Penguatan tata kelola keuangan dilakukan melalui pendampingan pencatatan transaksi usaha secara lebih sistematis. Sistem pencatatan yang diperkenalkan mencakup penerimaan kas, pengeluaran kas, pembelian bahan baku, serta penjualan. Format yang digunakan dirancang agar mudah dioperasikan oleh pelaku usaha dan dapat menjadi dasar penyusunan laporan sederhana.

Proses pendampingan menekankan bahwa pencatatan bukan hanya kegiatan administratif, tetapi juga merupakan sumber informasi untuk pengelolaan usaha. Ketika transaksi dicatat secara lebih teratur, pemilik usaha memiliki dasar untuk menelusuri arus kas, mengevaluasi pengeluaran, dan menilai perkembangan kegiatan usaha. Penyusunan laporan laba rugi sederhana juga membantu mitra membedakan hasil usaha dari perputaran kas.

Pendampingan juga diarahkan pada pemisahan antara keuangan usaha dan keuangan rumah tangga. Dalam usaha keluarga, kedua jenis transaksi ini sering terjadi dalam satu ruang ekonomi yang sama. Oleh sebab itu, pemisahan dilakukan secara bertahap melalui pembiasaan

pencatatan dan pengelompokan transaksi. Tujuannya bukan hanya menghasilkan dokumen, tetapi meningkatkan disiplin informasi keuangan.

Perubahan yang dicapai dalam program adalah mulai tersedianya sistem pembukuan digital serta format laporan keuangan yang lebih sederhana. Mitra memperoleh pengalaman dalam menggunakan format tersebut untuk mencatat transaksi. Hasil ini menunjukkan bahwa digitalisasi pada UMKM tradisional dapat dimulai dari perangkat yang sederhana dan sesuai kebutuhan, kemudian dikembangkan melalui pembinaan lanjutan.

Pengendalian Biaya Produksi dan Perhitungan HPP

Sebelum pelaksanaan program, perhitungan biaya produksi belum dilakukan secara terstruktur sehingga informasi mengenai harga pokok produksi belum tersedia secara memadai. Pendampingan dilakukan dengan memperkenalkan identifikasi komponen biaya serta penggunaan format perhitungan sederhana. Penguatan pengendalian biaya membantu mitra memahami hubungan antara bahan baku, penggunaan sumber daya dalam proses produksi, dan harga jual. Dalam kegiatan pendampingan, perhitungan HPP diposisikan sebagai alat bantu manajerial untuk menilai biaya produksi secara lebih terstandar, bukan sekadar sebagai perhitungan administratif. Melalui praktik perhitungan, mitra mulai memiliki dasar untuk menentukan harga jual dengan mempertimbangkan biaya produksi. Hasil tersebut juga dapat digunakan sebagai bahan evaluasi ketika terjadi perubahan biaya bahan baku atau perubahan kebutuhan produksi. Dengan demikian, perhitungan HPP berfungsi sebagai bagian dari proses pengambilan keputusan dalam suatu usaha. Luaran pada aspek ini berupa format perhitungan biaya dan HPP, serta peningkatan kemampuan mitra untuk menggunakan informasi biaya sebagai dasar penetapan harga jual. Keberlanjutan hasil sangat bergantung pada konsistensi penggunaan format setelah pendampingan selesai.

Penyusunan SOP dan Penguatan Manajemen Operasional

Penguatan manajemen operasional dilakukan melalui penyusunan dokumen SOP yang mencakup proses produksi, pengelolaan persediaan, pengendalian kualitas, serta pembagian tugas dan tanggung jawab. Kebutuhan SOP muncul karena proses kerja sebelumnya banyak didasarkan pada pengalaman dan kebiasaan tanpa standar tertulis. Penyusunan SOP dilakukan dengan pendekatan yang disesuaikan dengan karakteristik usaha. Tim tidak memposisikan SOP sebagai dokumen yang kaku, melainkan sebagai pedoman kerja yang dapat digunakan untuk menyatukan pemahaman tentang langkah-langkah penting. Melalui SOP, proses yang sebelumnya tersimpan dalam pengalaman individu mulai didokumentasikan sehingga lebih mudah dipelajari dan dikendalikan. Implementasi SOP diharapkan dapat membantu meningkatkan konsistensi dalam proses kerja. Pengrajin tetap mempertahankan keterampilan tradisionalnya, tetapi kegiatan pendukung usaha, seperti alur bahan, pembagian tugas, dan dokumentasi, dapat dilakukan dengan lebih tertib. Dengan demikian, manajemen operasional menjadi lebih terarah tanpa menghilangkan karakter tradisional produk. Luaran kegiatan pada aspek ini adalah tersusunnya dokumen SOP operasional dan mulai diterapkannya prosedur pada kegiatan usaha. SOP menjadi salah satu perangkat yang dapat terus disempurnakan berdasarkan pengalaman mitra.

Penerapan Sistem Pencatatan Persediaan

Pengelolaan persediaan menjadi bagian penting karena bahan baku dan hasil produksi merupakan sumber daya utama bagi suatu usaha. Sebelum program, pencatatan stok belum

dilakukan secara sistematis sehingga informasi mengenai jumlah bahan dan hasil produksi belum selalu tersedia saat dibutuhkan.

Pendampingan dilakukan melalui penyusunan sistem pencatatan persediaan dan kartu stok berbasis digital sederhana. Format tersebut dirancang untuk membantu mitra memantau bahan masuk, penggunaan bahan, serta hasil produksi. Penggunaan pencatatan secara rutin memungkinkan pengawasan persediaan dilakukan berdasarkan informasi yang lebih akurat.

Penerapan sistem persediaan juga mendukung pengendalian biaya karena penggunaan bahan dapat ditelusuri dengan lebih baik. Hubungan antara informasi persediaan, biaya, dan produksi menunjukkan bahwa perbaikan tata kelola perlu dilakukan secara terintegrasi.

Hasil pelaksanaan menunjukkan bahwa sistem pencatatan persediaan telah mulai diterapkan. Meskipun implementasinya masih memerlukan pembiasaan, tersedianya format monitoring merupakan langkah awal untuk memperkuat pengawasan stok dan meningkatkan efisiensi penggunaan bahan.

Penguatan Pemasaran Digital

Pada kondisi awal, pemasaran masih didominasi oleh penjualan langsung kepada pelanggan tetap, pasar tradisional, dan pesanan khusus. Media sosial telah digunakan secara terbatas, tetapi belum didukung oleh pengelolaan konten dan katalog yang terstruktur. Program ini memberikan pendampingan untuk memperkuat pemanfaatan media digital sebagai sarana promosi dan komunikasi. Kegiatan meliputi optimalisasi media sosial, penyusunan katalog produk digital, pengenalan Google Business Profile, serta pemanfaatan marketplace sesuai dengan kebutuhan usaha. Pemasaran digital dipahami sebagai perluasan saluran komunikasi, bukan pengganti hubungan dengan pelanggan yang telah terbentuk. Produk pande tradisional memiliki karakter yang kuat sehingga penyajian informasi digital perlu tetap menampilkan identitas produk, fungsi, dan keunikan usaha. Luaran yang dihasilkan mencakup media sosial usaha yang lebih aktif, katalog produk digital, profil bisnis digital, serta materi promosi. Mitra juga memperoleh peningkatan kapasitas dalam menyusun konten promosi. Dampak awal yang diharapkan adalah meningkatnya visibilitas dan jangkauan promosi.

Pendampingan Legalitas Usaha

Legalitas usaha menjadi salah satu aspek yang perlu diperkuat karena usaha yang belum memiliki dokumen legal yang memadai dapat menghadapi keterbatasan dalam mengakses berbagai peluang pengembangan. Pendampingan dimulai melalui sosialisasi mengenai pentingnya legalitas serta penjelasan tahapan administrasi yang diperlukan.

Proses pendampingan mencakup konsultasi, bantuan administrasi, penyiapan dokumen pendukung, serta fasilitasi pengurusan Nomor Induk Berusaha. Pendekatan ini dilakukan agar mitra tidak hanya mengetahui pentingnya legalitas secara teoretis, tetapi juga memahami langkah praktis yang perlu dilakukan.

Hasil pada aspek legalitas adalah tersedianya panduan dan proses pendampingan dalam pengurusan dokumen usaha. Capaian ini perlu dilihat sebagai proses penguatan kapasitas karena kelengkapan administrasi dapat memerlukan tindak lanjut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Penguatan legalitas berkaitan dengan pengelolaan usaha secara menyeluruh. Ketika informasi usaha, pencatatan, dan administrasi semakin tertib, mitra memiliki dasar yang lebih

baik untuk membangun akses terhadap peluang pembiayaan, program pemerintah, dan kerja sama usaha.

Delivery Produk Teknologi dan Inovasi

Pengantaran produk teknologi dan inovasi tidak hanya dilakukan melalui penyerahan perangkat. Proses dimulai dari identifikasi kebutuhan, perancangan dan penyesuaian inovasi, delivery sistem dan perangkat pendukung, pelatihan, praktik langsung, pendampingan implementasi, monitoring, evaluasi, hingga penyempurnaan.

Lima paket inovasi yang dikembangkan terdiri atas sistem pencatatan keuangan digital, sistem manajemen operasional, media pemasaran digital, pendampingan legalitas usaha, serta pendampingan keberlanjutan inovasi. Kelima paket tersebut saling melengkapi karena masalah yang dihadapi mitra juga saling berkaitan.

Pada paket keuangan, mitra memperoleh sistem pencatatan transaksi, penerimaan dan pengeluaran kas, pembelian bahan baku, penjualan, serta template laporan laba rugi sederhana. Pada paket manajemen operasional, mitra memperoleh SOP, kartu stok, formulir monitoring produksi, serta format perhitungan HPP.

Pada paket pemasaran, komponen yang dikembangkan mencakup media sosial usaha, katalog digital, profil bisnis digital, serta materi promosi. Pada paket legalitas, pendampingan diarahkan pada dokumen pendukung, panduan pengurusan, serta fasilitasi proses administrasi. Sementara itu, paket keberlanjutan menekankan konsultasi dan evaluasi penggunaan sistem agar inovasi tersebut dapat terus digunakan.

Pendekatan delivery tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan inovasi tidak cukup diukur dari ketersediaan perangkat. Manfaat yang lebih penting adalah kemampuan mitra untuk mengoperasikan, memelihara, dan mengembangkan perangkat sesuai dengan kebutuhan usaha.

Partisipasi Mitra dalam Pelaksanaan Program

Mitra terlibat dalam identifikasi permasalahan melalui observasi, wawancara, dan diskusi. Keterlibatan ini penting untuk memastikan bahwa masalah yang diprioritaskan benar-benar sesuai dengan kondisi usaha.

Dalam tahap peningkatan kapasitas, mitra mengikuti proses sosialisasi, pelatihan, diskusi, demonstrasi, dan praktik. Partisipasi dalam praktik langsung memungkinkan materi disesuaikan dengan transaksi dan proses operasional yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari.

Dalam tahap implementasi, mitra menggunakan perangkat yang telah disusun, mulai dari pencatatan keuangan, perhitungan biaya, pencatatan persediaan, SOP, hingga media promosi. Pada tahap monitoring, mitra memberikan informasi mengenai kendala yang muncul agar sistem dapat dievaluasi dan disesuaikan.

Partisipasi tersebut menjadi dasar bagi keberlanjutan karena tujuan program adalah membangun kemandirian, bukan ketergantungan pada pendamping. Semakin tinggi keterlibatan dalam proses penerapan, semakin besar peluang perangkat untuk terus digunakan setelah kegiatan utama selesai.

Perubahan Kondisi Mitra Setelah Pelaksanaan Program

Pelaksanaan program menunjukkan adanya perubahan pada seluruh aspek yang menjadi fokus pendampingan. Dari enam aspek yang diintervensi, yaitu tata kelola keuangan, pengendalian biaya, SOP operasional, persediaan, pemasaran, dan legalitas, semuanya menunjukkan perkembangan positif setelah program dilaksanakan. Secara kuantitatif, 6 dari 6 aspek (100%) mengalami perubahan kondisi, ditunjukkan melalui mulai diterapkannya pencatatan keuangan dan persediaan, kemampuan awal dalam menghitung biaya produksi, penyusunan SOP, pemanfaatan media digital untuk promosi, serta peningkatan pemahaman melalui pendampingan terkait legalitas usaha. Perubahan tersebut menunjukkan bahwa program telah memberikan dampak pada aspek pengelolaan usaha secara terpadu, meskipun tingkat penerapannya pada masing-masing aspek masih berada pada tahap awal dan memerlukan pendampingan berkelanjutan. Untuk Ringkasan perubahan kondisi mitra disajikan dalam Tabel 2.

Tabel 2. Ringkasan perubahan kondisi mitra

Aspek	Kondisi Sebelum Program	Perubahan Setelah Program
Tata kelola keuangan	Belum terdapat pencatatan yang sistematis.	Mitra mulai mampu mencatat transaksi dan menyusun laporan keuangan sederhana.
Pengendalian biaya	Belum menghitung HPP dan biaya produksi secara terstruktur.	Mitra memperoleh format dan kemampuan awal menghitung biaya sebagai dasar harga jual.
SOP operasional	Belum tersedia SOP tertulis.	SOP produksi dan operasional disusun dan mulai diterapkan.
Persediaan	Belum ada pencatatan stok yang sistematis.	Sistem pencatatan persediaan dan kartu stok mulai digunakan.
Pemasaran	Promosi masih didominasi cara konvensional dan penggunaan digital terbatas.	Media digital mulai dimanfaatkan untuk promosi dan penyusunan katalog.
Legalitas	Dokumen legal belum lengkap dan pemahaman masih terbatas.	Mitra memperoleh sosialisasi dan pendampingan terkait proses legalitas usaha.

Pelaksanaan program menunjukkan adanya perubahan pada seluruh aspek yang menjadi fokus pendampingan. Dari enam aspek yang diintervensi, yaitu tata kelola keuangan, pengendalian biaya, SOP operasional, persediaan, pemasaran, dan legalitas, semuanya menunjukkan perkembangan positif setelah program dilaksanakan. Secara kuantitatif, 6 dari 6 aspek (100%) mengalami perubahan kondisi, ditunjukkan melalui mulai diterapkannya pencatatan keuangan dan persediaan, kemampuan awal dalam menghitung biaya produksi, penyusunan SOP, pemanfaatan media digital untuk promosi, serta peningkatan pemahaman melalui pendampingan terkait legalitas usaha. Perubahan tersebut menunjukkan bahwa program telah memberikan dampak pada aspek pengelolaan usaha secara terpadu, meskipun tingkat

penerapannya pada masing-masing aspek masih berada pada tahap awal dan memerlukan pendampingan yang berkelanjutan.

Dokumentasi Pendukung Program

Dokumentasi visual yang tersedia dalam dokumen sumber digunakan sebagai dokumentasi pendukung identitas dan administrasi program. Dokumentasi ini dilengkapi dalam artikel untuk memperkuat penyajian informasi program. Dokumen sumber yang tersedia tidak memuat foto kegiatan lapangan secara lengkap; oleh karena itu, ruang dokumentasi kegiatan lapangan berikut tetap perlu diganti atau ditambahkan dengan foto asli kegiatan, seperti observasi, pelatihan, pendampingan, dan implementasi, apabila akan digunakan sebagai dokumentasi publikasi final.

Dokumentasi Kegiatan Lapangan

Pengabdian kepada masyarakat merupakan kegiatan yang terprogram dan mempunyai susunan kegiatan. Maka dari itu dokumentasi menjadi hal penting yang bisa menjadi salah satu bukti dari terlaksananya program. Berikut beberapa dokumentasi kegiatan yang tersaji pada Gambar 1, yaitu kegiatan observasi dan identifikasi kondisi awal mitra.

Gambar 1. Kegiatan observasi dan identifikasi kondisi awal mitra



Gambar 2. Kegiatan sosialisasi dan pelatihan tata kelola keuangan digital



Gambar 3. Kegiatan pendampingan penyusunan SOP dan manajemen operasional.



Gambar 4. Kegiatan pendampingan digital marketing dan legalitas usaha.



Dampak, Pembelajaran, dan Implikasi Program

Pelaksanaan program menunjukkan bahwa permasalahan usaha tradisional dapat berasal dari keterbatasan sistem pengelolaan, bukan hanya keterbatasan teknis produksi. Pada mitra, kemampuan menghasilkan produk telah berkembang melalui pengalaman dan keterampilan

turun-temurun, tetapi proses tersebut belum sepenuhnya didukung oleh pencatatan, pengendalian, dan dokumentasi. Karena itu, penguatan manajemen menjadi bagian penting dari strategi pemberdayaan.

Pendampingan keuangan memberikan pembelajaran bahwa perubahan tidak harus dimulai dari sistem yang terlalu rumit. Format sederhana yang sesuai dengan kemampuan pengguna dapat menjadi titik awal untuk membangun kebiasaan pencatatan. Ketika pencatatan sudah dilakukan secara konsisten, informasi keuangan dapat dikembangkan untuk kebutuhan yang lebih luas.

Pada aspek operasional, penyusunan SOP memberikan pembelajaran tentang pentingnya dokumentasi pengetahuan. Keterampilan tradisional tetap menjadi inti proses produksi, tetapi prosedur pendukung dapat ditulis agar lebih mudah dipahami, digunakan bersama, dan diteruskan. Dengan cara ini, modernisasi tata kelola tidak berarti menghilangkan karakter tradisional dari usaha.

Digitalisasi pemasaran juga memberikan pembelajaran bahwa penggunaan teknologi perlu disesuaikan dengan kapasitas mitra. Media digital dapat dimanfaatkan secara bertahap melalui akun usaha, katalog, profil bisnis, dan konten promosi. Pendekatan bertahap lebih sesuai bagi pelaku usaha yang sebelumnya belum menggunakan strategi digital secara terstruktur.

Pada aspek legalitas, pendampingan menunjukkan bahwa kebutuhan pelaku usaha tidak hanya terletak pada informasi mengenai manfaat dokumen legal, tetapi juga pada pemahaman terhadap proses administrasi. Oleh karena itu, kombinasi antara sosialisasi dan pendampingan praktis menjadi penting.

Implikasi keberlanjutan program terletak pada penggunaan perangkat yang telah disusun. Sistem keuangan digital, format HPP, SOP, kartu stok, dan media pemasaran akan memberikan manfaat apabila digunakan secara konsisten. Karena itu, monitoring berkala dan konsultasi lanjutan diperlukan untuk membantu mitra mengatasi kendala dalam implementasi.

Model pemberdayaan yang dihasilkan berpotensi direplikasi pada usaha kerajinan tradisional sejenis, dengan penyesuaian terhadap karakteristik mitra. Tahapan analisis kebutuhan, peningkatan kapasitas, praktik langsung, pendampingan, monitoring, dan keberlanjutan dapat menjadi kerangka kerja umum, sedangkan perangkat teknis perlu disesuaikan dengan jenis usaha dan tingkat kesiapan digital.

Secara keseluruhan, program ini menghasilkan fondasi perubahan dalam tata kelola usaha. Dampak awal berupa tersedianya perangkat dan peningkatan kemampuan perlu dilanjutkan dengan pembiasaan penggunaan. Dengan demikian, keberhasilan jangka panjang lebih tepat dipahami sebagai proses transformasi bertahap menuju upaya yang lebih terdokumentasi, efisien, adaptif, dan mandiri. Untuk Luaran yang dihasilkan dalam program pengabdian disajikan dalam Tabel 3.

Tabel 3 Luaran yang dihasilkan dalam program pengabdian

Kategori	Luaran	Bentuk Capaian
Luaran utama	Peningkatan tata kelola keuangan digital	Sistem pembukuan digital, pencatatan transaksi, dan laporan keuangan sederhana.
Luaran utama	Penguatan manajemen operasional	Dokumen SOP, format perhitungan HPP, dan sistem pencatatan persediaan.
Luaran utama	Peningkatan kapasitas digital marketing	Media sosial, katalog digital, profil bisnis, dan materi promosi.
Luaran utama	Pendampingan legalitas usaha	Panduan dan proses pendampingan administrasi dan legalitas usaha.
Luaran tambahan	Model keberlanjutan inovasi	Monitoring, konsultasi, evaluasi, dan rencana tindak lanjut penggunaan sistem.
Luaran diseminasi	Publikasi dan dokumentasi praktik baik	Artikel pengabdian dan dokumentasi hasil program.

Analisis Keberlanjutan Penerapan Inovasi

Keberlanjutan merupakan bagian penting dalam kegiatan pengabdian karena keberhasilan program tidak hanya ditentukan oleh terselesaikannya pelatihan dan penyerahan produk inovasi. Dalam program ini, keberlanjutan diarahkan pada kemampuan mitra untuk terus menggunakan sistem pencatatan keuangan, format pengendalian biaya, SOP, pencatatan persediaan, media digital, serta perangkat administrasi yang telah diperkenalkan.

Pada aspek keuangan, keberlanjutan membutuhkan kebiasaan pencatatan. Sistem yang sederhana dapat memberikan manfaat apabila digunakan secara konsisten untuk mencatat transaksi. Oleh karena itu, fokus tindak lanjut tidak hanya pada penambahan fitur, tetapi juga pada kedisiplinan dalam penggunaannya. Setelah kebiasaan pencatatan terbentuk, informasi yang tersedia dapat dikembangkan untuk kebutuhan analisis yang lebih luas.

Pada aspek manajemen operasional, SOP perlu diperlakukan sebagai dokumen yang dapat disempurnakan. Perubahan kebutuhan produksi, ketersediaan bahan, dan pembagian kerja dapat memerlukan penyesuaian prosedur. Keberadaan SOP memberikan dasar agar penyesuaian dilakukan secara lebih terarah dan terdokumentasi.

Sistem persediaan juga memerlukan konsistensi. Kartu stok dan pencatatan bahan akan bermanfaat apabila setiap perubahan persediaan dicatat. Dengan demikian, pendampingan keberlanjutan dapat difokuskan pada pembiasaan administrasi dan penyederhanaan format apabila ditemukan kesulitan dalam penggunaannya.

Dalam pemasaran digital, keberlanjutan bergantung pada kemampuan mitra dalam mengelola konten dan memperbarui informasi produk. Media digital yang telah dibuat perlu terus digunakan sebagai sarana komunikasi. Pendekatan yang realistis adalah membangun aktivitas digital secara bertahap sesuai dengan kapasitas pengelola usaha.

Pada aspek legalitas, keberlanjutan berkaitan dengan kemampuan mitra untuk memahami fungsi dokumen usaha dan melakukan pembaruan administrasi apabila diperlukan. Pendampingan awal dapat menjadi pintu masuk untuk meningkatkan kesadaran bahwa pengelolaan usaha tidak hanya berkaitan dengan produksi dan penjualan, tetapi juga dengan kepatuhan administratif.

Rencana keberlanjutan program ini didukung melalui pembinaan berkala, konsultasi luring dan daring, evaluasi penggunaan sistem, serta penyempurnaan inovasi. Mekanisme tersebut penting untuk menjaga hubungan antara tim pengabdian dan mitra sebagai bagian dari proses pembelajaran jangka menengah.

Keterkaitan Program dengan MBKM dan Indikator Kinerja Perguruan Tinggi

Pelaksanaan program pengabdian berkaitan dengan pembelajaran berbasis pengalaman. Mahasiswa terlibat dalam proses analisis permasalahan mitra serta perancangan solusi yang praktis. Kegiatan lapangan memberikan konteks nyata bagi penerapan pengetahuan dari bidang akuntansi, manajemen, dan hukum bisnis UMKM.

Melalui pembelajaran berbasis proyek, mahasiswa dapat melihat hubungan antara konsep akademik dan persoalan di dunia usaha. Pencatatan transaksi, penyusunan laporan sederhana, perhitungan biaya, penyusunan SOP, serta pemahaman mengenai legalitas merupakan contoh kegiatan yang dapat diterapkan dalam konteks pendampingan masyarakat.

Program ini juga mendukung penguatan soft skills dan hard skills. Soft skills berkembang melalui komunikasi dengan masyarakat, kerja tim, dan kemampuan menyampaikan solusi secara praktis. Hard skills diperkuat melalui analisis kondisi usaha, penyusunan perangkat administrasi, serta pendampingan penerapan sistem.

Kolaborasi lintas kompetensi menjadi bagian penting karena permasalahan mitra tidak hanya berada dalam satu bidang. Tata kelola keuangan memerlukan kompetensi akuntansi, manajemen operasional memerlukan pemahaman proses bisnis, sedangkan legalitas usaha membutuhkan pemahaman administrasi dan hukum bisnis.

Dari sisi indikator kinerja perguruan tinggi, kegiatan ini memberikan ruang bagi mahasiswa untuk memperoleh pengalaman belajar di luar kelas. Dosen berperan sebagai pendamping dan fasilitator dalam penyelesaian persoalan masyarakat. Hasil kerja tim juga diarahkan agar dapat dimanfaatkan secara langsung oleh mitra melalui sistem dan perangkat yang telah diterapkan.

Keterkaitan tersebut memperkuat peran perguruan tinggi sebagai penghubung antara pengembangan pengetahuan dan kebutuhan masyarakat. Pengabdian menjadi ruang untuk menguji kebermanfaatan kompetensi akademik sekaligus membangun proses pembelajaran yang responsif terhadap persoalan lokal.

Keterbatasan Pelaksanaan dan Arah Pengembangan Program

Pelaksanaan program menunjukkan bahwa transformasi tata kelola pada usaha tradisional membutuhkan waktu dan perlu dibiasakan. Penerapan sistem keuangan, pencatatan persediaan, dan SOP tidak dapat sepenuhnya dinilai hanya dari keberadaan dokumen. Perubahan yang lebih bermakna terletak pada penggunaan perangkat secara konsisten dalam kegiatan sehari-hari.

Keterbatasan lain adalah bahwa tingkat kesiapan digital setiap pelaku usaha dapat berbeda-beda. Karena itu, perangkat digital perlu dirancang agar sederhana dan disesuaikan dengan kemampuan pengguna. Penerapan teknologi yang terlalu kompleks justru berisiko tidak digunakan secara berkelanjutan. Pada aspek pemasaran, program telah memperkuat kesiapan media digital, tetapi hasil peningkatan jangkauan pasar perlu diamati lebih lanjut. Aktivitas promosi membutuhkan pengelolaan konten yang konsisten serta penyesuaian terhadap respons pasar.

Pada aspek legalitas, pendampingan merupakan proses yang perlu mengikuti ketentuan dan kelengkapan administrasi yang berlaku. Karena itu, capaian program pada bidang ini perlu dilanjutkan hingga seluruh kebutuhan dokumen dan proses administrasi terpenuhi sesuai dengan kondisi masing-masing pelaku usaha. Arah pengembangan program selanjutnya dapat difokuskan pada pendampingan lanjutan terhadap penggunaan sistem yang telah dibangun. Data keuangan yang mulai tersedia dapat dikembangkan sebagai dasar untuk mengevaluasi usaha. Sistem persediaan dapat diperbaiki melalui kebiasaan pencatatan. SOP dapat dievaluasi berdasarkan pengalaman implementasinya. Media digital dapat ditingkatkan melalui pengelolaan konten yang lebih konsisten.

Secara keseluruhan, pengembangan berikutnya perlu mempertahankan prinsip bahwa inovasi harus selaras dengan kebutuhan mitra. Pendekatan bertahap, partisipatif, dan berbasis praktik menjadi pembelajaran utama dari pelaksanaan program ini. Dengan prinsip tersebut, model pemberdayaan memiliki peluang untuk direplikasi dan disesuaikan pada kelompok usaha kerajinan tradisional lainnya.

Kesimpulan

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat pada Kelompok Tiuk Pande Tatasan menunjukkan bahwa permasalahan utama industri pande tradisional lebih dominan pada tata kelola usaha dibandingkan dengan aspek teknis produksi. Kondisi awal mitra menunjukkan keterbatasan dalam pencatatan keuangan, pengendalian biaya, penerapan SOP operasional, pengelolaan persediaan, pemanfaatan pemasaran digital, serta pemenuhan legalitas usaha. Melalui pendekatan Participatory Action Research (PAR), program dilaksanakan melalui lima tahapan, yaitu analisis kebutuhan dan koordinasi awal, sosialisasi dan peningkatan kapasitas, implementasi dan pendampingan, monitoring dan evaluasi, serta keberlanjutan dan diseminasi. Pendekatan tersebut memungkinkan mitra terlibat secara aktif dalam proses perubahan dan penerapan solusi. Hasil pelaksanaan menunjukkan adanya perubahan bertahap dalam praktik pengelolaan usaha. Mitra mulai memiliki dan menerapkan pencatatan keuangan digital, laporan keuangan sederhana, format perhitungan biaya dan HPP, SOP operasional, sistem pencatatan persediaan, media pemasaran digital, serta pendampingan proses legalitas. Delivery inovasi dilakukan melalui transfer pengetahuan yang diikuti oleh praktik langsung dan pendampingan agar perangkat dapat digunakan secara mandiri. Keberlanjutan program perlu diarahkan pada

konsistensi penggunaan sistem dan perangkat yang telah disusun. Monitoring, konsultasi, dan penyempurnaan berkala menjadi penting untuk menjaga keberlanjutan perubahan. Program ini memberikan dasar bagi pengembangan model pemberdayaan usaha pande tradisional yang mengintegrasikan penguatan tata kelola, transformasi digital, manajemen operasional, dan legalitas usaha secara bertahap.

Daftar Pustaka

- Marthanu, I. W., Sanjani, M. R., & Maghfiroh, S. (2025). Sosialisasi Profesi Auditor untuk Meningkatkan Minat dan Motivasi Mahasiswa Program Studi Akuntansi UCIC dalam Menghadapi Persaingan Dunia Kerja. *Abdimas Galuh*, 7(1), 711-718.
- Mulyani, M., Lukman, I., Novita, D., Putri, D. L., Andreansyah, M. F., Susanti, M., & Salsabilla, S. (2025). Edukasi Keuangan Untuk Memperkenalkan Konsep Keuangan dan Kontrol Finansial untuk Masa Depan. *Jurnal Pengabdian Kolaborasi dan Inovasi IPTEKS*, 3(2), 458-462.
- Richmayati, M. ., Sandra, E., Khadijah, K., Sarmini, S., & Fauziah, S. (2025). Peran Akuntansi Menuju Ketahanan Bangsa. *PUAN INDONESIA*, 6(2), 593–600. <https://doi.org/10.37296/jpi.v6i2.324>
- Sugito, S., Zulfida, I., Dewi, D. S., Harahap, E. H., Mahuli, J. I., Pangeran, P., & Lubis, R. H. (2025). Pemberdayaan petani milenial melalui edukasi hukum agraria, inovasi teknologi pertanian, dan manajemen agribisnis berbasis platform digital. *Journal Liaison Academia and Society*, 5(2), 22-33.
- Irwanto, I. (2025). Pemberdayaan Masyarakat Melalui Kuliah Kerja Mahasiwa (KKM) Di Desa Koranji Kecamatan Pulosari Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten Sebagai Bentuk Pengabdian Perguruan Tinggi. *To Maega: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 8(2), 432-453.
- Wahyuningtyas, E. T., Majidi, L. M. S., Suhari, S. I., Fahri, M., & Fitriyah, A. L. (2025). Pelatihan Dasar Akuntansi Digital: Menyiapkan Generasi Muda Menghadapi Transformasi Profesi Akuntan. *INTEGRATIF: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(1), 1-7.
- Arisudhana, Dicky, Sugeng Priyanto, Taqwa Putra Budi Purnomo Sidi Hiram, and Indah Rahayu Lestari. "Pelatihan akuntansi dasar sebagai pendekatan dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengurus koperasi simpan pinjam." *Jurnal Padamu Negeri 2*, no. 4 (2025): 142-149.
- Nento, H. P., Tunggati, M. T., Polidu, I., Masaguni, O. S., Mamu, K. Z., Suaib, S. O., & Moha, S. W. S. (2025). Peningkatan Literasi Hukum dalam Pengelolaan Keuangan: Strategi Edukasi bagi UMKM Modern Di Kecamatan Duingi. *Abdimas Awang Long*, 8(1), 137-150.
- Kurniawan, I. D., Septiningsih, I., Adhliyati, Z., & Hartanto, H. (2025). Revitalisasi BUMDes Jaya Janti Sebagai Upaya Meningkatkan Pendapatan Asli Desa. *Jurnal Atma Inovasia*, 5(3), 232-240.
- Inayah, N. K., Kurniawati, R., Jamal, A., Putri, S. A., Putra, V. K., & Firdaus, F. (2025). Optimalisasi Proses Akuntansi melalui Seminar Pembukuan Digitalisasi dengan

Abdibaraya: Jurnal Pengabdian Masyarakat
Penguatan Tata Kelola Keuangan Digital, Manajemen Operasional, dan Legalitas Usaha pada Industri Pande
Tradisional di Bali Berbasis Ekonomi Kreatif
Vol. 5 No. 02 2026
E-ISSN: 2964-9072
Universitas Ma'arif Nahdlatul Ulama Kebumen
Pembukuan Digital sebagai Solusi Modern. *Nusantara Community Empowerment*
Review, 3(2), 237-241.